

EDISI : Selasa, 15 Oktober 2019

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :  
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL  
SETDA KABUPATEN BULELENG



**RESUME BERITA****EDISI :Selasa, 15 Oktober 2019**

NO	NAMA MEDIA	JUDUL BERITA	RESUME	KET.
1	FAJAR BALI	Sampah, Suradnyana Tekankan Edukasi Pada Masyarakat	Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana,ST menekankan edukasi kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting saat ini. Hal ini dilakukan agar masyarakat bersama dengan stakeholder lainnya sadar dalam menjaga dan memelihara lingkungan, agar dapat menciptakan lingkup yang sehat dan bersih khususnya di kabupaten buleleng. Hal tersebut diungkap Bupati Agus Suradnyana usai menghadiri Sidang Paripurna terkait dengan penyampian nota pengantar Bupati tentang beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), bertempat di Ruang Sidang Utama, Gedung DPRD Kabupaten Buleleng, Senin (14/10).	
		Harapkan Perahu Karet	Badan penanggulangan bencana daerah kabupaten buleleng sangat mengharapkan bantuan perahu karet (rubber boat). Hal itu menyusul beberapa bulan yang lalu yakni pertengahan bulan Januari 2019 Kapal Motor (KM) Katamaran dilengkapi dua mesin, berkapasitas 150 PK yang terbuat dari fiber milik BPBD Buleleng hancur akibat dihantam gelombang pasang, dengan hancurnya perahu fibber milik BPBD Buleleng yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat dengan nilai Rp 2,5 milyar kini BPBD Buleleng sangat mengharapkan adanya bantuan perahu karet.	
		Pedagang Daging Anjing Terbanyak di Buleleng	Perdagangan daging anjing yang kerap dikenal dengan warung RW marak terjadi di Kabupaten Buleleng. Sebagai bukti setelah dilakukan pendataan yang dilakukan Dinas	

			Peternakan Provinsi Bali beberapa hari ini yang terlalu terlihat banyak penjual daging anjing atau warung RW yang ada di Buleleng dan bahkan dari penindakan yang dilakukan sebanyak 10 pedagang RW sudah diberikan peringatan keras dimana dalam pemberian peringatan tersebut dilakukan pada bulan Mei 2019 yang lalu.	
2	RADAR BALI	Sekkab: Perdin Sesuai Kebutuhan	Rencana anggota DPRD Buleleng meminta tambahan alokasi anggaran perjalanan dinas (perdin), nampaknya tidak akan berjalan mulus. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meminta agar dewan lebih memprioritaskan kebutuhan dasar, ketimbang alokasi perjalanan dinas. Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka tak menampik kabar sejumlah anggota dewan yang meminta tambahan anggaran perdin.	





## KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Bali Post*

Kategori : *Disnak*

# Disnak Bali Larang Jual Daging Anjing

## 10 Penjualan Rw Diawasi di Buleleng

MESKIPUN pemerintah melarang penjualan daging anjing alias Rw itu, namun faktanya warga yang menggeluti kuliner dengan menjual daging anjing masih marak saja. Dari hasil pengawasan Dinas Peternakan (Disnak) Provinsi Bali di Buleleng ditemukan 10 tempat menjual daging anjing yang dikonsumsi warga. Jumlah itu terbanyak di antara sembilan kabupaten dan kota di Bali. Lalu bagaimanakah pengawasan pelarangan penjualan daging guk-guk itu dapat dilakukan lebih optimal?

SETELAH penjualan daging anjing marak dan penularan penyakit rabies tetap merebak, kemudian Disnak, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Bali turun ke kabupaten untuk mensosialisasikan larangan penjualan daging anjing untuk konsumsi warga.

Untuk memaksimalkan upaya ini, Senin (14/10) kemarin, staf Disnak, Satpol PP, dan PPNS melakukan koordinasi ke Polres Buleleng. Rapat dipimpin Waka-polres Kopol Loduwyk Tapilaha, S.IK.

Staf Disnak Bali I Made Angga Prayoga di lobi Mapol-

res Buleleng mengatakan, peredaran dan penjualan daging anjing itu bukan saja dilarang Undang-Undang (UU) juga Perda dan Instruksi Gubernur Bali. Sejauh ini, pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke kabupaten dan kota di Bali. Paling pertama yang disasar Buleleng. Di Den Bukit itu ditemukan 10 tempat usaha yang menjual beragam olahan daging anjing. Warga yang melakoni usaha itu telah diberikan peringatan pertama, kedua, dan ada yang menerima peringatan ketiga. Beberapa penjual daging anjing di Bali Utara itu menyatakan bersedia tidak lagi menjual daging anjing untuk dikonsumsi.

"Penjualan daging anjing dilarang, karena anjing merupakan hewan peliharaan. Selain itu dari aspek kesehatan dagingnya memang bukan untuk dikonsumsi. Dari bulan Mei sampai Agustus kami lakukan pemantauan. Ternyata di Buleleng paling banyak kita temukan, sehingga penyadaran kami lebih dahulu ke sini," katanya.

Selama melakukan pemantauan kata Angga Prayoga, terungkap kalau pedagang daging anjing di Buleleng itu menjadikan usahanya sebagai penghasilan sehari-hari. Alasan mereka menjual daging anjing karena membeli dengan harga murah. Bahkan sering anjing itu dikasi warga karena hewannya sering menggigit. "Paling banyak itu karena mudah dapat anjing. Alasan warga penikmat daging anjing semangat mengonsumsi daging anjing karena ada mitos mengonsumsi daging anjing itu berkhasiat menghilangkan suatu penyakit," jelasnya.

Setelah menemukan banyaknya penjual daging anjing, pihaknya sekarang masih melakukan pengawasan. Pemerintah daerah sedang





## KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media :

Kategori : *sambungan*

mengkaji untuk menghentikan praktik penjualan daging anjing di seluruh Bali melalui pemberian kompensasi. Hanya saja, bentuk kompensasi itu belum ditentukan. Alasannya, masih dikaji bekerja sama dengan Universitas Udayana (Unud) dan salah satu universitas asing. Secara bertahap, pemerintah daerah bekerja sama dengan kepolisian menghentikan penjualan daging anjing di masyarakat.

"Kami koordinasi dan menyampaikan hasil pengawasan termasuk regulasi yang mengatur. Paling utama pemerintah memprogramkan pemberian kompensasi. Karena hal itu menyangkut isi perut (penghasilan warga-red). Penegakan hukumnya merupakan upaya terakhir, sehingga ini memerlukan dukungan aparat kepolisian," tegasnya.

Wakapolres Kopol Loduwik Tapilaha, S.I.K. mengatakan, larangan penjualan daging anjing itu sudah menjadi keputusan pemerintah. Pihaknya mendukung dan siap membantu kalau dilakukan penindakan. Namun, menghindari terjadinya per-

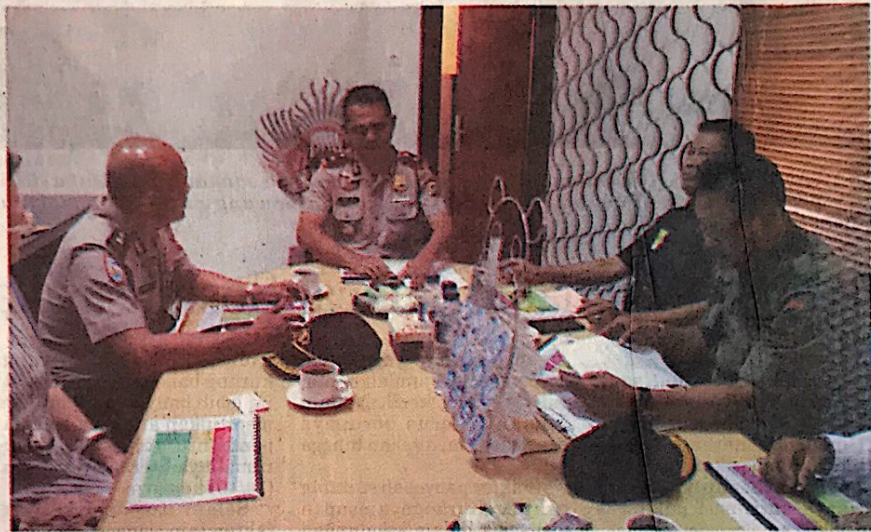
soalan dalam penindakan itu, dipandang perlu dilakukan sosialisasi yang melibatkan, aparat terkait, tokoh masyarakat, kepolisian dan TNI.

Terkait penanganan secara pidana, pihaknya juga siap membantu hal itu. Na-

mun penanganan pidana penjualan daging anjing itu dilakukan PPNS, sehingga kepolisian tinggal membantu penanganan hukum lebih lanjut.

"Apa yang udah diputuskan pemerintah kita wajib membantu pelaksanaan

di lapangan. Namun, kami harapkan sebelum penindakan itu ada baiknya sosialisasi melibatkan semua *stakeholders*, sehingga dapat mencecah terjadinya persoalan yang lebih besar di lapangan," harapnya. (mud)



**DAGING ANJING** - Disnak Bali, Senin kemarin, berkoordinasi ke Polres Buleleng terkait larangan penjualan daging anjing untuk dikonsumsi. Bali Post/mud





## KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Bali Post*

Kategori : *Bansos*

### Soal "Jatah" Hibah Bansos Dewan Diminta Pertimbangkan Kebutuhan dan Keinginan

Singaraja (Bali Post) -

Jatah hibah bantuan sosial (Bansos) yang dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Buleleng Tahun 2020 sebesar Rp 500 juta. Hal itu merupakan hasil kajian teknokratis Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pada rancangan itu hibah bansos sebesar 0,5 miliar rupiah selama setahun menjadi kebijakan pemerintah. Pertimbangan yang sangat krusial itu semata-mata memperhatikan kondisi keuangan Pemkab Buleleng.

Atas kebijakan bansos itu diposkan Rp 500 juta, dewan mengusulkan menaikkan alokasi hibah bansos itu menjadi Rp 700 juta. Atas usulan dewan itu, diharapkan dewan realistis dengan anggaran yang ada. Maksudnya, dewan meski mempertimbangkan antara kebutuhan dan keinginan.

Ketua TAPD sekaligus Sekab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P. menyatakan hal itu, Senin (14/10) kemarin, usai sidang paripurna penyampaian nota pengandara RAPBD 2020 di gedung dewan. Sidang itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Ketut Susila Umbara didampingi Gede Suradnya.

Dewa Ketut Puspaka mengatakan, setiap pembahasan RAPBD pemerintah melalui kebijakan anggaran selalu mentargetkan agar rancangan keuangan itu menyelesaikan setiap kebutuhan masyarakat. Dia mencontohkan, salah satu kebutuhan itu adalah alokasi anggaran untuk Universal

Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal itu harus mendapat alokasi anggaran besar, dalam hal itu diposkan Rp 186 miliar. Selain itu, kebijakan menjawab komitmen politik seperti revitalisasi Pasar Banyuwangi itu memerlukan anggaran Rp 130 miliar. Keperluan itu telah dijawab dalam RAPBD 2020.

"TAPD melakukan kajian teknokratis yang kita berikan kepada pimpinan harus menyelesaikan kebutuhan dasar rakyat dan menjawab komitmen politik," katanya.

Terkait usulan "jatah" hibah bansos dari rancangan Rp 500 juta dinaikan menjadi Rp 700 juta, Puspaka menyebut hal itu sah-sah saja dilakukan dewan. Hanya saja, kondisi keuangan dengan kebijakan pembangunan itu harus dituntaskan masuk skala prioritas. Karena itu harusnya dijadikan pertimbangan matang usulan kenaikan alokasi hibah bansos itu sendiri. "Pada intinya usulan itu sah-sah saja. Namun, hal itu kembali keputusan pimpinan. Tetapi yang jelas usulan apapun itu perlu dicermati dengan cara menyimak secara komprehensif antara kebutuhan dan keinginan," jelasnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini menambahkan, usulan kenaikan perjalanan dinas itu dimungkinkan oleh regulasi. Dalam kajian ini, pihaknya menambahkan untuk perjalanan dinas terutama di eksekutif mengedepankan urgensinya. Sedangkan perjalanan dinas dewan pembahasannya dilakukan internal. Nantinya hal itu difasilitasi kesekretariatan dewan (setwan).

"Untuk memenuhi hal itu kembali merupakan kewenangan Bupati. Kami hanya memberikan kajian teknokratis kepada pimpinan sebelum diputuskan. Namun sambil jalan akan dibahas," tegas Dewa Ketut Puspaka. (kmb38)



Ir. Dewa Ketut Puspaka

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG





## KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali Post

Kategori : Kebakaran hutan

# Hutan Lindung Puncak Landep Kembali Dilahap Si Jago Merah



Singaraja (Bali Post) -

Kawasan hutan lindung Puncak Landep di Dusun Mekar Sari Desa Panji Kecamatan Sukasada kembali terbakar. Sedikitnya api pada peristiwa kebakaran kedua kalinya itu menelan sekitar 10 hektar lahan hutan lindung. Namun, penyebab pasti kebakaran itu masih belum diketahui. Ada dugaan sangat kuat pemicunya karena unsur kesengajaan.

Dari informasi yang dikumpulkan di lapangan, Senin (14/10) kemarin, sebelum kejadian, warga di sekitar lereng hutan itu menemukan kepulan asap membung-bung tinggi ke udara, Minggu petang (13/10) lalu. Temuan itu, membuat warga heboh. Sebab, setelah itu api dengan cepat menyebar. Kemudian, dalam waktu singkat kepulan asap itu berubah menjadi bara api yang cukup besar. Titik api ditemukan persis pada lokasi kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu.

Dari lokasi itu, api menjalar membakar rumput, semak liar, dan beberapa tanaman kayu yang tumbuh di dalam kawasan hutan itu. Sampai tengah malam, api masih menyala terutama di bagian lereng barat. Khawatir titik api itu semakin meluas, aparat pemerintahan desa bersama Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panji bersama TNI/Polri menuju lokasi bersama-sama ikut memadamkan api. Dengan cara gotong royong, titik api itu berhasil ditangani dengan peralatan manual.

Ketua BUMDes Panji Edy Susena menjelaskan, api cepat membesar dan menjalar karena semak, rumput liar dan kayu kering mudah terbakar. Akibatnya, titik api cepat meluas. Diperkirakan, hutan di lereng barat yang terdampak kebakaran ini sekitar 5 hektar.

"Ini kejadian kedua dan titik api sekarang di sebelah

barat dari kejadian pertama. Api cepat sekali membesar. Hingga penyekat yang kami buat ikut terbakar," katanya.

Kebakaran di tempat sulit itu menyebabkan upaya pemadaman dengan menyemprotkan air dari Pemadam tidak bisa dilakukan. Ini karena, medan sulit dilalui. Jangankan kendaraan pemadam, sepeda motor saja sulit menjangkau lokasi kebakaran itu. Tak pelak, kondisi ini memaksa pemadaman dilakukan dengan cara manual.

"Hanya ada jalan setapak. Sedangkan di bagian kanan kiri jurang, anggota KTH bersama warga bersama aparat TNI dan polisi tadi malam (Minggu, 13/10-red) naik ke lokasi untuk menyekat api biar tidak lagi meluas," jelasnya.

### Titik Api Berkurang

Hingga tengah malam, titik api sudah berkurang. Namun, warga khawatir kembali muncul titik api lainnya. Anggota KTH bersama warga sekitar hari ini kembali memastikan apakah api sudah benar-benar padam. Hasilnya, masih terlihat ada sisa asap. Diperkirakan, titik api itu belum padam dengan baik, sehingga warga berharap ada bantuan untuk memadamkan api.

Di tempat terpisah Dan-dim 1609/Buleleng Letkol Inf. Verdy De Irawan, S.H., M.Tr. (Han) mengatakan, sejak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terjadi, pihaknya menyiagakan per-

sonel yang tergabung dalam satuan tugas (satgas). Satgas ini beranggotakan 150 orang. Mereka standby di Makodim 1609/Buleleng

Selain itu, personel bantuan dari Batayon 900 Rider disiapkan kalau terjadi Karhutla dalam skala besar. Terkait kebakaran yang belakangan terjadi, Verdy De Irawan menyebut kejadian itu sudah bisa ditangani dengan cara menerjunkan personel Babinsa di desa terkait.

"Seperti kebakaran hutan Desa Panji, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula dan daerah lainnya sudah ditangani. Penanganan kebakaran itu bersinergi dengan Polri, aparat desa, dan kelompok masyarakat. Satgas ini sudah siaga. Kalau terjadi karhutla skala besar maka bantuan dari Batalyon 900 Rider siap turun," katanya.

Verdy De Irawan menambahkan, menyusul kejadian Karhutla, pihaknya tetap berkomitmen memadamkan api, sehingga kebakaran itu tidak memicu dampak lebih luas. Komitmen ini tidak lepas dari instruksi Presiden Joko Widodo yang menugaskan TNI memadamkan api kalau terjadi kebakaran di hutan.

"Tidak boleh ada api di hutan. Janksinya sangat berat, jabatan bisa dicopot, sehingga kami komit menjaga hutan itu jangan sampai terbakar," jelas Verdy De Irawan usai menghadiri sidang paripurna di gedung DPRD Buleleng. (kmb38)





## KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali Post

Kategori : Anggaran

Triwulan III Tahun 2019

# Realisasi Anggaran Undiksha Tertinggi Khusus PTN-BLU

**REALISASI** anggaran Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) triwulan III tahun 2019 menempati peringkat pertama, tertinggi se-Indonesia khusus Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU). Besarannya mencapai 65,78 persen.

Hal tersebut sesuai hasil evaluasi kinerja kelembagaan yang dilakukan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) yang disampaikan, Senin 14 Oktober 2019.

Rektor Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.,

Senin (14/10) kemarin, mengungkapkan evaluasi tersebut dilakukan pada 104 Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU). Khusus capaian peringkat tertinggi Undiksha itu, dinyatakan hal itu merupakan hasil kinerja bersama, mulai

rektorat, fakultas, pascasarjana, maupun bagian-bagian terkait.

"Ini hasil kinerja semua pihak. Kinerja pimpinan di bawah koordinasi Wakil Rektor II," ungkapnya. Capaian tersebut kata mantan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksha itu diharapkan bisa sejalan dengan kualitas program yang telah direalisasikan yang juga bermuara pada peningkatan kualitas lembaga, sehingga semakin mampu berdaya saing.

"Hal itu bisa diwujudkan karena kebersamaan seluruh stakeholder di lembaga. Kami ingin hal seperti ini bisa dipertahankan. Bahkan bisa semakin baik. Tidak hanya terkait tata kelola keuangan, tetapi juga hal lainnya," katanya.

Wakil Rektor II Undiksha, Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., juga mengapresiasi capaian itu. Dijelaskan, peringkat Undiksha berada di atas Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Brawijaya, Universitas Riau dan Univer-



sitas Negeri Makassar. "Kami tentu sangat mengapresiasi hal ini. Karena saat triwulan II, Undiksha belum masuk peringkat pertama. Namun baru masuk lima besar saat itu," jelasnya.

Capaian anggaran sebesar itu, menurut Lasmawan menunjukkan tata kelola keuangan sudah berjalan maksimal. Hal itu juga dinilai sebagai dampak tata kelola berbasis online. Sistem ini mampu menunjukkan akuntabilitas keuangan maupun progres pelaksanaan kegiatan, sehingga memudahkan dalam evaluasi. "Selama ini kontroling yang kita gunakan model online secara transparan dan akuntabel. Dari itu kita melihat pergerakan langkah demi langkah uang negara yang dikelola di Undiksha ini," jelasnya.

Disampaikan lebih lanjut, tata kelola keuangan di Undiksha berbasis desentralisasi. Artinya sejak awal tahun, anggaran sudah terlokasikan dan terkooptasi ke masing-masing fakultas,

pascasarjana dan lembaga. Kebijakan ini tidak diterapkan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia. "Masih banyak perguruan tinggi lain berlabel BLU. Mereka memilih bersifat sentralistik. Artinya tata anggaran terpusat di rektorat. Di Undiksha menggunakan pola desentralisasi. Dan hasilnya relatif positif," terangnya bangga.

Capaian itu, kata Prof. Lasmawan, adalah sebuah pemicu bagi civitas akademik Undiksha untuk bisa mengembangkan dan menjadikan iklim kebersamaan sebagaimana sering dikemukakan rektor.

"Ini merupakan tantangan dan peluang Undiksha untuk meraih berbagai prestasi bidang tata kelola dan bidang akademis. Karena seberapa hebat pun sebuah lembaga tanpa adanya support dari tata kelola anggaran, niscaya prestasi lain sulit diraih," sebut akademisi asal Desa Bonjoh, Kecamatan Kintamani, Bangli itu.

Menggenjot realisasi ang-

garan itu, Undiksha mempersiapkan beberapa strategi. Yakni mengintensifkan koordinasi dengan berbagai lini, melakukan pemetaan realisasi kegiatan, dan evaluasi secara berkelanjutan dengan cara melibatkan Satuan Pengawasan Internal (SPI).

"Kami akan cermati program yang belum terealisasi atau terealisasi belum maksimal. Selain itu juga menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab. Apakah karena memang belum jadinya atau memang ada kendala. Kami ingin seluruhnya dapat berjalan baik," pungkasnya.

Selain sebagai pamuncak terkait realisasi anggaran, Undiksha juga terpilih sebagai penerima buku tentang rekam jejak perjalanan tata kelolanya selama 4 tahun terakhir, bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mewakili PTN Berbadan Hukum. "Ini juga sebagai bentuk penghargaan dari Kemristekdikti kepada Undiksha," pungkasnya. (ad397)